

Komitmen OGP

Negara	Indonesia		
Nomor dan Nama Komitmen	Mendorong Transparansi dan Partisipasi dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah		
Deskripsi Singkat Komitmen	Komitmen ini ingin mendorong transparansi di pengadaan barang dan jasa termasuk pengadaan darurat, meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan pemerintah, dan memperluas keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa.		
Pengusul Komitmen	Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia		
Pemangku Kepentingan	Kementerian/ Lembaga (K/L)	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)	Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 4. Komisi Informasi Provinsi 5. Komisi Informasi Pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Masyarakat Sipil di Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta 2. Kelompok jurnalis di Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMKM di di Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta
Jangka Waktu	Januari 2023-Desember 2024		

Identifikasi Masalah

1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

Setiap tahun pemerintah pusat maupun daerah mengalokasikan anggaran pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan jumlah yang berlimpah. Pada 2021, LKPP mencatat belanja pengadaan barang dan jasa mencapai Rp 1.214 triliun. Jumlah ini sekitar 52,1% dari total Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN).

Sayang, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk PBJ juga rentan dikorupsi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch, sepanjang 2016 - 2021, setidaknya 40% kasus korupsi yang terjadi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango, yang menyatakan bahwa 70% kasus korupsi terkait dengan pengadaan.

Di tengah pandemi COVID-19, potensi korupsi pengadaan menjadi lebih besar. Sebab informasi mengenai pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat tidak terpublikasi dan sulit diakses oleh masyarakat. Meskipun pandemi menuntut pelaksanaan pengadaan yang cepat di tengah keadaan darurat, namun penting untuk tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi korupsi di pengadaan barang dan jasa adalah dengan membuka informasi pengadaan sebanyak-banyaknya. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses pengadaan. Di sisi lain, membuat pelaku usaha lebih memahami kebutuhan pemerintah dan bagaimana pelaku usaha dapat terlibat dalam pengadaan yang akan dilakukan. Pada akhirnya, dapat meningkatkan kompetisi dan persaingan usaha yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Gagasan keterbukaan kontrak pengadaan barang/jasa ini merupakan kelanjutan dari RAN OGI periode 2021-2022, khususnya dalam hal peningkatan transparansi proses pengadaan yang menargetkan publikasi seluruh dokumen dalam bentuk data terbuka.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang merinci informasi dan dokumen PBJ yang bersifat terbuka untuk publik, maka standar yang baru ini perlu disosialisasikan dan diimplementasikan secara luas di semua Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta sistem pengadaan elektronik yang berlaku.

2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

Tingginya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di sebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kurangnya transparansi informasi pengadaan pemerintah, khususnya informasi yang penting dan dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah anggaran yang dialokasikan sesuai. Meskipun Indonesia telah menggunakan pengadaan secara elektronik, namun masih banyak informasi pengadaan yang belum dipublikasi. Misalnya, informasi mengenai spesifikasi barang/ jasa dan jumlah yang akan dibeli. Selain itu, masih ada K/L/PD yang menganggap bahwa informasi pengadaan merupakan informasi yang dikecualikan atau bukan informasi publik. Kedua, rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut memantau proses pengadaan pemerintah. Hal ini dikarenakan proses pengadaan kompleks sehingga sulit bagi masyarakat awam untuk melakukan pemantauan. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi masyarakat sebelum melakukan pemantauan pengadaan.

Deskripsi Komitmen

1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

1. Membuat kajian yang menjelaskan bahwa informasi pengadaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan merupakan informasi publik. Kajian ini kemudian digunakan sebagai pedoman dalam mendorong Perki Standar Layanan Informasi Publik yang secara khusus menjabarkan keterbukaan informasi di pengadaan barang dan jasa.
2. Mendorong lahirnya Perki 1/2021 mengenai Standar Layanan Informasi Publik yang salah satu pasalnya menjelaskan secara rinci informasi pengadaan barang dan jasa yang harus di buka oleh Badan Publik
3. Mendorong masuknya indikator keterbukaan pengadaan barang dan jasa dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Komisi Informasi Pusat mengakomodir indikator transparansi pengadaan pada IKIP 2021 namun indikatornya masih kurang tajam.
4. Mendorong dashboard pengadaan darurat dalam kanal LPSE. Usulan ini telah ditindaklanjuti oleh LKPP, namun informasi yang dipublikasi masih sangat minim.

2. Solusi apa yang diusulkan?

Untuk menjawab kondisi di atas, maka ICW dan TII bersama jaringan kelompok masyarakat di beberapa daerah mendorong beberapa hal, yaitu:

1. Mendorong LKPP untuk lebih banyak mempublikasi informasi pengadaan barang/jasa di kanal yang mudah di akses oleh publik
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengunggah informasi pengadaan darurat ke kanal SPSE
3. Memperluas partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa
4. Meningkatkan efisiensi dan memperbaiki proses kanal complaint handling mechanism untuk pengadaan barang dan jasa
5. Memperluas keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa
6. Memastikan implementasi Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik khususnya di pengadaan barang dan jasa

3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?

Membuka informasi pengadaan akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau dan memberikan masukan kepada pemerintah atas pengadaan yang dilakukan. Selama ini, salah satu hambatan dalam pengawasan pengadaan publik adalah minimnya informasi yang dapat diakses melalui sistem pengadaan (baru tahapan perencanaan hingga penetapan pemenang) sementara permintaan informasi membutuhkan waktu yang lama. Dengan membuka informasi di sistem pengadaan maka hal ini akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Selain itu, informasi pengadaan juga akan mempermudah pelaku usaha untuk terlibat dalam pasar pengadaan pemerintah yang berujung pada proses pengadaan yang lebih kompetitif dan efisien, serta menghasilkan barang/jasa yang berkualitas.

Lebih lanjut, Pemerintah, OMS, Akademisi, dan Jurnalis juga dapat memanfaatkan data tersebut untuk analisis lebih lanjut mengenai efektivitas dan potensi kecurangan dalam pengadaan.

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
<p>1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi? <i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?</i></p>	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai transparansi yang dijabarkan dalam Undang-Undang No 14/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p> <p>Adanya publikasi informasi pengadaan barang dan jasa tentunya akan meningkatkan akses masyarakat atas informasi tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kajian, pemantauan, maupun ikut serta dalam pengadaan pemerintah.</p>
<p>2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas? <i>Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?</i></p>	<p>Mempublikasi informasi pengadaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan.</p> <p>Dengan informasi tersebut, masyarakat dapat melihat, menganalisis, dan mengetahui bagaimana implementasi perencanaan dan serapan anggaran yang telah dialokasikan.</p>

<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p> <p><i>Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?</i></p>	<p>Dengan membuka lebih banyak informasi pengadaan barang dan jasa akan mendorong partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengadaan, melakukan pemantauan atas pengadaan yang dilakukan, maupun menggunakan data tersebut untuk mendorong perbaikan kebijakan di pengadaan pemerintah.</p>
---	---

Perencanaan Komitmen <i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>			
Ukuran Keberhasilan <i>(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)</i>	Output yang Diharapkan <i>(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)</i>	Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan	Pemangku Kepentingan
<p>1. LKPP mempublikasi transaksi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah di e-katalog</p>	<p>1. Adanya kesepakatan informasi transaksi e-katalog apa saja yang akan dipublikasikan</p>	<p>Des 2023</p>	<p>Penanggungjawab Utama: ICW & TII</p>
			<p>Pemangku Kepentingan Pendukung</p>
			<p>K/L</p>
<p>LKPP</p>			
<p>2. Informasi pengadaan darurat lebih jelas dan lebih banyak Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang mempublikasi</p>	<p>1. Kanal PBJ darurat minimal mencakup: pemenang berkontrak, spesifikasi barang yang dibeli, berapa jumlahnya, sumber dana</p> <p>2. Review Perlem PBJ Darurat untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan darurat</p>	<p>Des 2023</p>	<p>Penanggungjawab Utama: ICW & TII</p>
			<p>Pemangku Kepentingan Pendukung</p>
			<p>K/L</p>
<p>LKPP</p> <p>Kementerian Dalam Negeri</p>			

	3. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran yang meminta seluruh Pemda melengkapi informasi PBJ daruratnya				
3. Mendorong efektivitas kanal complaint handling mechanism pengadaan (e-pengaduan) dalam menangani pengaduan masyarakat	1. Pengembangan API terbuka 2. Integrasi E-pengaduan ke Opentender.net 3. Mengintegrasikan Inspektorat K/L/PD dalam sistem e-Pengaduan	Des 2024	Penanggungjawab Utama: ICW		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			LKPP		
			Kementerian Dalam Negeri		
4. Mendorong pengembangan database Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) yang terintegrasi dan terbuka, termasuk	1. Menyediakan informasi mengenai data rekaman kinerja/ performa penyedia 2. Menambahkan data riwayat daftar hitam. 3. Menambahkan informasi mengenai beneficial ownership (LKPP bisa membuat kebijakan calon penyedia untuk melampirkan	Des 2023	Penanggungjawab Utama: ICW & TII		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			LKPP		

	informasi BO atau integrasi dengan Kemenkumham)				
5. Mendorong pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	1. Pelatihan bagi UMKM mengenai peluang UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. Audit Sosial mengenai kemudahan UMKM terlibat dalam pengadaan pemerintah	Des 2024	Penanggungjawab Utama: ICW		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
		LKPP	OMS di Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta	UMKM	
6. Penguatan peran masyarakat untuk melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh publik	1. Training pengadaan barang dan jasa untuk CSO dan Jurnalis 2. Penyusunan Modul Pengadaan Barang dan Jasa bagi CSO 3. Penyusunan modul Akademi Antikorupsi mengenai Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa	Des 2024	Penanggungjawab Utama: ICW & TII		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
		K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)	
		April 2023	LKPP	OMS di Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta	
April 2023			Kelompok jurnalis di Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan,		

				DKi Jakarta	
7. Mendorong sistem pengadaan elektronik yang mengakomodir keterbukaan informasi di pengadaan sesuai Perki 1/2021 tentang Standar Layanan Informasi Pengadaan (pasal 15 angka 9), yaitu menyediakan dokumen/ informasi yang dapat diakses oleh publik	1. Terpublikasinya informasi dan dokumen barang/jasa pemerintah sesuai Perki 1/2021 2. Tersedianya kode unik untuk menyatukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dalam satu program/proyek yang sama	Des 2024	Penanggungjawab Utama: ICW & TII		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)
			LKPP		
8. Mendorong Implementasi Perki SLIP 1/2021 tentang Standar Informasi Publik, khususnya di pengadaan	1. Uji akses keterbukaan informasi di tingkat Provinsi 2. Memasukkan poin keterbukaan pengadaan barang/jasa dalam MONEV Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan KIP	Des 2024	Penanggungjawab Utama: ICW & TII		
			Pemangku Kepentingan Pendukung		
		K/L	OMS	Others (e.g., Parliament, Private Sector etc)	
		Des 2023	Komisi Informasi Pusat	OMS di Sumatera Utara, NTT, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKi Jakarta	
			Komisi Informasi Daerah		